

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA BATU MALANG**

SKRIPSI



Oleh

VIRA AYU SANTI

NIM: 18520074

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA BATU MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S Akun)



Oleh

VIRA AYU SANTI

NIM: 18520074

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA
BATU MALANG

SKRIPSI

Oleh

VIRA AYU SANTI

NIM : 18520074

Telah Disetujui Pada Tanggal 20 Desember 2022

Dosen Pembimbing,



Zuraidah, M.S.A

NIP. 197612102009122001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA
BATU MALANG

SKRIPSI

Oleh
VIRA AYU SANTI
NIM : 18520074

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 28 Desember 2022

Susunan Dewan Penguji:

1 Penguji Utama

Sri Andriani, M.Si

NIP : 197503132009122001

2 Ketua Penguji

Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE., MM. Ak., CA

197411221999031001

3 Sekretaris Penguji

Zuraidah, M.S.A

197612102009122001

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vira Ayu Santi
Nim : 18520074
Fakultas : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU MALANG adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 02 Desember 2022

Hormat saya,


Vira Ayu Santi
NIM: 18520074

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu Malang”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, L.C., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., Ca., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Zuraidah, SE., M.SA., CSRS. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan untuk penulis.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Alm. Bapak, Almh Ibu, terimakasih sudah membimbing penulis dengan sepenuh hati meskipun tidak menemani hingga titik ini, namun Skripsi ini penulis persembahkan untuk Ibu dan Bapak tercinta
7. Kakak-kakak dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara moril dan spirituil. Teman temanku yang bernama Viona, Melinia, Tutut, Dilla, Della, Selvi, Merry, Arhayu, dan Winda yang selalu memberikan support dalam penulisan skripsi ini
8. Ogy Choirudin Anggriawan yang selalu menemani kemanapun penulis untuk kepentingan menyelesaikan skripsi dan selalu mendukung penulis
9. Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu yang telah membantu daam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharpkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin ya Robbal'Alamin...

Malang, 02 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACK	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Teoritis.....	12
2.2.1 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).....	12
2.2.2 Organisasi Sektor Publik.....	20
2.2.3 Akuntansi Berbasis Akrual.....	21
2.2.4 Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	22
2.2.3 Peranan SAP Berbasis Akrual	24
2.3 Kajian Islam	25
2.4 Kerangka Berfikir.....	27
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	28

3.1.1 Jenis Penelitian.....	28
3.1.2 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Subjek Penelitian.....	29
3.4 Data dan Jenis Data.....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data	30
3.6 Analisis Data	32
BAB IV	34
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	34
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	34
4.1.1 Profil Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu	34
4.1.2 Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu	34
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU	36
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.	37
4.1.4 Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu	39
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	40
4.2.1 Analisis Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu	41
4.2.2 Pemahaman Basis Akrual pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.....	49
4.2.3 Sosialisasi Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Berbasis Akrual.....	51
4.2.4 Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Menerapkan SAP berbasis Akrual	53
4.2.5 Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual	56
4.2.6 Komitmen Organisasi Dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrual	57
BAB V.....	59
KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penggunaan PP 71 Tahun 2010	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2.2 Perbedaan SAP lama dan SAP baru.....	18
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO	43
Tabel 4.2 Kegiatan Sosialisasi Penerapan SAP berbasis akrual Di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kota Batu.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Laporan Operasional	42
Gambar 4.2 Laporan Realisasi Anggaran	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	64
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian	65
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran.....	66
Lampiran 4 Laporan Operasional	67
Lampiran 5 Dokumentasi wawancara Kasubag Keuangan dan Staff Keuangan	69

ABSTRAK

Vira Ayu Santi. 2022, SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan Akuntansi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu Malang”

Pembimbing : Zuraidah, SE., M.SA., CSRS.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah, Basis Akrua, Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dibuat oleh Komisi Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) guna untuk menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 masih menganut basis kas menuju akrual atau disebut dengan istilah *cash toward accrual*. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 telah menggunakan penerapan akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh. Penerapan ini harus dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2015. Oleh karena itu, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari wawancara kepada Kasubag Keuangan yaitu Bapak Nasrul Hadi S.Sos dan Staff Keuangan yaitu Bapak Dodi, serta melihat dokumen laporan keuangan yang telah di buat oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu sudah siap menerapkan SAP berbasis akrual. Kesiapan dalam menerapkan SAP berbasis akrual adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu sudah menggunakan laporan operasional dan laporan realisasi anggaran yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

ABSTRACT

Vira Ayu Santi. 2022. *THESIS: "Analysis Application Accountancy Based on Accruals at the Department of Cooperatives, Micro Enterprises and Trade in Batu Malang City"*

Supervisor : Zuraidah, SE., M.SA., CSRS.

Keyword : *Standard Accountancy Government, Accrual Basis, Report Finance*

Government regulations No. 71 of 2010 was made by the Commission Standard Accountancy Government To use for replace PP No. 24 of 2005 still adheres to a cash basis towards accrual While Government regulations Number 71 of 2010 uses application accountancy based accrual by thorough. Application this must conducted no later than 2015. Because that, this study aims to knowing how application accountancy based accruals at the Department of Cooperatives, Micro Enterprises and Trade Batu City.

This research study used qualitative descriptive method. Source of data comes from Interview to head of division finance namely Mr. Nasrul Hadi S.Sos and finance staff namely Mr. Dodi, and see document report existing finances.

Research results show that the Department of Cooperatives, Micro Enterprises and Trade of Batu City has implementing SAP based accruals. Readiness in implementing company accounting standards based accrual is the Service already using operational reports and budget realization reports in accordance with accrual-based government accounting standards.

المستخلص البحث

فيرا أيو سانتي. ٢٠٢٢، البحث العلمي. العنوان: "تحليل تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق في مكتب التعاونيات والشركات الصغيرة والتجارة في مدينة باتو مالانج"

المشرفة : زريدة، الماجستير

الكلمات الأساسية : معايير المحاسبة الحكومية، أساس الاستحقاق، القوائم المالية

صُنعت اللائحة الحكومية رقم ٧١ لعام ٢٠١٠ من قبل لجنة معايير المحاسبة الحكومية لتحل محل اللائحة الحكومية ٢٤ لعام ٢٠٠٥ التي لا تزال تلتزم بأساس الاستحقاق النقدي. حيث أن، يستخدم اللائحة الحكومية رقم ٧١ لعام ٢٠١٠ المحاسبة على أساس الاستحقاق شاملاً. يجب تنفيذ هذا التطبيق في موعد لا يتجاوز ٢٠١٥ . لذلك، فإن الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيفية تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق في مكتب التعاونيات والشركات الصغيرة والتجارة في مدينة باتو. طريقة البحث المستخدمة هي البحث الوصفي النوعي. مصدر البيانات يأتي من مقابلات مع رئيس القسم المالي الفرعي، السيد نصر الهادي بكالوريوس في العلوم الاجتماعية والموظف المالي وهو السيد دودي. بعد ذلك، انظر إلى مستندات التقرير المالي الموجودة. تظهر نتائج الدراسة أن مكتب التعاونيات والشركات الصغيرة والتجارة في مدينة باتو قد نفذ نظام معايير المحاسبة الحكومية على أساس الاستحقاق. الجاهزية في تطبيق معايير المحاسبة الحكومية القائم على الاستحقاق هو أن الإدارة تستخدم بالفعل تقارير مالية، وهي تقارير تحقيق الميزانية، والتقارير التشغيلية، وتقارير في تغييرات حقوق الملكية، والميزانيات العمومية، و ملاحظات على البيانات المالية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari keberadaan sebuah organisasi di sekitar lingkungannya. Adapun contoh dari organisasi seperti sektor publik antara lain dinas pendidikan, institusi pemerintah dan rumah sakit. Dinas, Institusi dan Badan dibentuk untuk menyediakan jasa kepada masyarakat. Berbeda dengan prinsip sektor swasta yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, sebuah sektor publik dibentuk semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam memberikan kesejahteraan, pemerintahan diuntut untuk selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya guna mewujudkan *good governance* yang mana memiliki ciri khas yaitu transparansi, akuntabilitas, dan professional. Dalam menjalankan tugas, pemerintah pastinya membutuhkan suatu anggaran dana. Sebagai pengguna anggaran diharuskan untuk transparansi dalam menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang telah diatur undang-undang oleh pemerintah pusat serta peraturan pemerintah daerahnya. Mengingat bahwa laporan keuangan nantinya akan dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berlandaskan hukum yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah diatas pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan di Indonesia sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dibuat oleh Komisi Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) guna untuk menggantikan PP Nomor 24 tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 masih menganut basis kas menuju akrual atau disebut dengan istilah *cash toward accrual*. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 telah menggunakan penerapan akuntansi akrual berbasis akrual secara menyeluruh. Penerapan ini harus dilakukan selambat-lambatnya pada tahun 2015. Penggunaan SAP yang baru ini diharapkan agar dalam melaporkan keuangan suatu instansi disajikan secara benar sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku. Akuntansi berbasis akrual itu sendiri yaitu setiap transaksi maupun peristiwa diakui, dicatat, serta disajikan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa melihat kas diterima maupun di bayarkan.

Sebagai agenda reformasi keuangan sebuah pemerintahan, Standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual diharapkan lebih sistematis dalam mengelola keuangan yang baik. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi juga menjadikan SAP cocok dijadikan sebagai pedoman dalam Menyusun sebuah laporan keuangan sebuah Dinas (Erwinto Putra:2013).

Menurut (Marlisa, Mahdani:2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Dalama Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat Daya". Penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan

aplikasi SAIBA untuk Menyusun laporan keuangan sudah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2020. Adapun laporan dari aplikasi SAIBA menghasilkan empat laporan keuangan yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, serta laporan perubahan modal. Sedangkan untuk laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih tidak dilaporkan dengan alasan BPS tidak memiliki pendapatan lain selain anggaran belanja yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Untuk catatan atas laporan keuangan (CaLK) disusun dengan memakai aplikasi CaLK sendiri. Namun operator masih menemui beberapa kendala seperti pembaruan aplikasi yang sering terjadi, ketidakseimbangan sistem, serta kurangnya pemahaman operator dalam melakukan penjurnalan karena operatornya sendiri bukan dari lingkup ekonomi.

Menurut (Melina S., Ahmad IH, Yunus R.: 2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Berbasis Akrua (Studi Kasus pada BPKD Pemerintahan Kabupaten Gowa) menyatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa sudah melaksanakan pelaporan keuangan berlandaskan Peraturan Pemerintah yang terbaru yaitu PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. BPKAD juga telah menyajikan 7 laporan keuangan yang memang harus dicantumkan seperti LRA, laporan perubahan saldo, laporan arus kas, neraca, laporan operasional, laporan perubahan modal, serta catatan atas laporan keuangan.

Menurut (Lasabuda: 2020) yang melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitiannya menyimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pemerintah Provinsi Sulut sudah menerapkan SAP berbasis akrual dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 meskipun masih 80% penggunaannya. Hal ini dikarenakan memiliki kendala seperti sistem informasi, sering terjadi eror pada aplikasi penunjang sistem, sumber daya manusia yang kurang memadai serta kurangnya tenaga akuntansi.

Tabel 1.1
Penggunaan PP Nomor 71 Tahun 2010

No.	Nama Dinas	Penggunaan PP Nomor 71 tahun 2010
1	Badan pengelola keuangan dan asset daerah Provinsi Sulawesi Utara	Menggunakan 80% dikarenakan memiliki kendala seperti sistem informasi, sering terjadi eror pada aplikasi penunjang sistem, sumber daya manusia yang kurang memadai serta kurangnya tenaga akuntansi.
2	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	Menggunakan sekitar 85% hanya terkendala pada SDM yang belum siap sepenuhnya dikarenakan bukan berasal dari bidang ilmu akuntansi.
3	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Barat Daya	Sudah menggunakan 90% namun operator masih sering mengalami pembaharuan aplikasi serta kurangnya pemahaman operator dikarenakan bukan berasal dari bidang ilmu ekonomi.
4	Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Berbasis Akrua (Studi Kasus pada BPKD Pemerintahan Kabupaten Gowa)	Sudah 100% melaksanakan pelaporan keuangan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dengan menyajikan 7 laporan keuangan seperti LRA, laporan perubahan saldo, laporan arus kas, neraca, laporan operasional, laporan perubahan modal, serta catatan atas laporan keuangan.

Sumber : Data diolah peneliti, 2022.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Standar Akuntansi telah membuat Peraturan baru tentang standar akuntansi pemerintah yang mengharapkan seluruh jajaran pemerintah menggunakan peraturan tersebut sebagai pedoman dalam menyajikan laporan keuangan. Namun yang terjadi masih ada beberapa pemerintah daerah yang sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual namun masih belum sepenuhnya 100% sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan internal maupun kurang adanya SDM yang ahli dalam bidangnya, karena ketersediaan sumber daya manusia merupakan unsur yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Pemerintah kota Batu mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut dari kementerian keuangan RI atas hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Hal ini menjadi sebuah motivasi untuk melakukan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan penerapan SAP berbasis akrual.

Penelitian mengenai penerapan standar akuntansi berbasis akrual telah banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya, namun penelitian ini masih menarik untuk diteliti kembali dikarenakan masih banyak kendala terutama pada Sumber Daya Manusia nya dalam penerapan SAP berbasis akrual meskipun sudah berjalan selama 10 tahun, sejak diwajibkannya penerapan sap berbasis akrual yang diterapkan pada PP No 71 tahun 2010. Oleh karena itu

peneliti juga ingin membahas kembali penerapan SAP berbasis akrual pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan merupakan pelayanan publik di Kota Batu yang dikhususkan untuk melayani masyarakat dalam membantu melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu memiliki tiga bidang yaitu bidang koperasi, bidang usaha mikro, industry kecil, dan menengah, serta bidang perdagangan. Dinas ini juga memiliki sebuah pusat layanan yaitu PLUT atau Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM yang membantu masyarakat terutama para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dalam menjalankan tugasnya, dinas ini diharuskan untuk tetap optimal dalam melayani masyarakat. Tidak terlepas dari tugasnya tersebut Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu juga diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban instansi.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan SAP berbasis akrual pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu Adapun alat ukur yang digunakan dalam penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu yaitu Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010. Judul dari penelitian yang di ambil adalah **“Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah yaitu “Bagaimana Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Penelitian juga diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi donasi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu akuntansi.
2. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota batu, memberikan masukan bagi para pekerja tentang seberapa pentingnya penerapan akuntansi berbasis akrual.
3. Bagi Peneliti, sebagai media pembelajaran bagaimana penerapan SAP berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
4. Bagi Lembaga Pendidikan, diharapkan menjadi salah satu referensi untuk pembelajaran khususnya ilmu akuntansi dalam penerapan SAP berbasis akrual yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penggunaan penelitian terdahulu sebagai landasan teori dan rujukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
1	Marlisa dan Said Mahdani/ 2021	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Dalam Penyusunan Laporan keuangan BPS Kabupaten Aceh Barat Daya	Penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan aplikasi SAIBA untuk Menyusun laporan keuangan sudah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat Daya dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Adapun laporan dari aplikasi SAIBA menghasilkan empat laporan keuangan yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, serta laporan perubahan modal. Sedahkan untuk laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih tidak dilaporkan dengan alasan BPS tidak memiliki pendapatan	Metode kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dan observasi langsung, dan data sekunder yang diperoleh dari data yang telah didokumentasikan instansi berupa laporan keuangan yang dihasilkan menggunakan aplikasi SAIBA.

Sumber : data diolah peneliti (2022)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
			lain selain anggaran belanja yang diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Untuk catatan atas laporan keuangan (CaLK) disusun dengan memakai aplikasi CaLK sendiri. Namun operator masih menemui beberapa kendala seperti pembaruan aplikasi yang sering terjadi, ketidakseimbangan sistem, serta kurangnya pemahaman operator dalam melakukan penjurnalan karena operatornya sendiri bukan dari lingkup akuntansi ataupun ekonomi.	
2	Siska Meliana, Ibrahim H. Ahmad, Rostiaty Yunus/ 2020	Analisis laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual (studi kasus pada BPKD pemerintahan Kabupaten Gowa)	BPKD Kabupaten Gowa sudah melaksanakan pelaporan keuangan berlandaskan Peraturan Pemerintah yang terbaru yaitu PP No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. BPKD juga telah menyajikan 7 laporan keuangan yang memang harus dicantumkan seperti LRA, laporan perubahan saldo, laporan arus kas, neraca, laporan operasional, laporan perubahan modal, serta catatan atas laporan keuangan.	Menggunakan metode kualitatif deskriptif

Sumber : Data diolah peneliti (2022)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
3	Anastasya A. Lasabuda, Jenny Morasa, Victorina Z. Tirayoh/ 2020	Analisis penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan pada badan pengelola keuangan dan asset daerah Provinsi Sulawesi Utara	Penelitiannya menyimpulkan bahwa BPKAD pemerintah Provinsi Sulut sudah menerapkan SAP berbasis akrual dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 meskipun masih 80% penggunaannya. Hal ini dikarenakan memiliki kendala seperti sistem informasi, sering terjadi eror pada aplikasi penerapan sistem, sumber daya manusia yang kurang memadai serta kurangnya tenaga akuntansi.	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.
4	Febransyah, Dinda Astari/ 2021	Analisis tingkat pemahaman akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pada kantor camat Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir	Pada segi SDM kantor camat tanjong batu masih belum memadai dikarenakan latar belakang pendidikan para pegawai belum sesuai dengan tugas yang dikerjakan sekarang. Namun kassubag keuangan menyatkan bahwa alat yang digunakan sebagai pendukung penerapan akuntansi berbasis akrual adalah SIMDA versi 2.7.7. Meskipun demikian, SKPD Kantor Camat Tanjung Batu mendukung sepenuhnya untuk penerapan sistem akuntansi berbasis akrual meskipun masih ada kendala dalam melaksanakannya.	Menggunakan sumber data primer dengan cara wawancara dan juga sumber data sekunder yang telah ada yaitu laporan keuangan.

Sumber : Data diolah peneliti (2022)

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Metode Penelitian
5	Ailen Safitri, Meyzi Heriyanto, Mariaty Ibrahim/ 2017	Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual	Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemerintah kabupaten kepulauan meranti dari parameter kesiapan komitmen, sistem informasi, sarana prasarana dan SOP menunjukkan interval rata-rata SIAP. Sedangkan untuk SDM nya masih dalam rata-rata interval cukup siap. hal ini dikarenakan SDM yang bernotaben dari ilmu akuntansi masih kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah harus meningkatkan kualitas dan memupuk SDM nya sehingga nantinya bisa Menyusun laporan keuangan berbasis akrual seutuhnya.	Metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif

Sumber : Data diolah Peneliti (2022)

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisis sebuah laporan keuangan pada pemerintahan apakah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada lokasi penelitian. Peneliti tertarik untuk mengambil topik ini karena masih belum ada yang meneliti tentang laporan keuangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu apakah sudah sesuai atau belum dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

2.2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Sujarweni (2014:18) akuntansi pemerintah berhubungan dengan bidang keuangan negara yang dimulai dari anggaran hingga pelaksanaan serta pelaporan dan pengaruh yang ditimbulkan nantinya. Menurut Mahsun (2006) para pihak eksternal yang berkepentingan dalam mengambil keputusan membutuhkan laporan keuangan pemerintah daerah yang didapatkan dari hasil proses akuntansi yang berisi neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, serta catatan atas laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 saat ini dijadikan acuan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Adapun perbedaan dari kedua peraturan pemerintah ini terletak pada basis pencatatan transaksi serta jenis laporan keuangannya yang mana PP No 71 tahun 2010 sudah berbasis akrual sedangkan PP No 24 tahun 2005 masih menggunakan sistem kas menuju akrual.

(Sinaga, 2005) SAP merupakan pedoman yang menyatukan antara pengguna, penyusun, dan auditor. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. SAP digunakan untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan eksternal auditor (BPK) untuk pengguna laporan

keuangan termasuk legislatif yang akan menggunakannya sebagai kriteria dalam melaksanakan audit

Dari beberapa pengertian diatas yang telah dijelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan acuan wajib guna menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Basis-basis yang berkaitan dengan waktu atas pengukuran yang telah dilakukan dan terlepas dari sifat pengukuran tersebut. Beberapa basis atau dasar akuntansi atau sistem pencatatan tersebut yakni sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi Kas

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 yang menjelaskan mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI ialah akuntansi yang mengakui bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa yang penting lainnya pada saat kas atau setara dengan kas diterima atau dibayar.

b. Basis Akuntansi AkruaI

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI ialah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa penting lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima ataupun dibayar.

c. Basis Kas Modifikasian

Kebijakan Akuntansi menurut butir (12) dan butir (13) lampiran XXIX Kepmendagri No 29 Tahun 2002 dalam Abdul Halim 2008 menyebutkan bahwa :

“(12) basis dasar modifikasian ialah kombinasi dasar kas dan akrual, (13) transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dibuktikan (dicatat atau dijurnal) pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas)”

d. Basis Akrual Modifikasian

Basis akrual modifikasian mencatat transaksinya dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

2.2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah (Pemda) serta kementerian-kementerianya dan dinas-dinasnya. Dalam penerapan SAP ini diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pada laporan keuangan dalam pemerintahan pusat dan daerah.

Kebutuhan standar akuntansi pemerintah kembali menguat seiring berkembangnya akuntansi di sektor komersil dengan dikeluarkannya standar akuntansi keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Oleh sebab itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), kementerian keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi. Pemerintah memerlukan suatu

standar akuntansi dalam bidangnya sendiri untuk menjalankan aktifitas layanan kepada masyarakat luas.

Berikut merupakan dasar hukum penerapan akuntansi berbasis akrual ialah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk membuat sebuah standar yang relevan dengan praktik akuntansi di organisasi sektor publik telah dilakukan dengan baik oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) maupun oleh pemerintah sendiri (Nordiawan, 2006). Untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang terdapat dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit dipemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah di Indonesia diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintahan yang dibentuk oleh semua komite SAP (Nordiawan dkk, 2007).

2.2.1.3 Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sudah harus diterapkan dalam laporan keuangan tahun anggaran 2005. Artinya yakni laporan keuangan pada tahun 2005 harus sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hal serupa juga telah diterapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus sudah diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan anggaran tahun 2010.

Standar Akuntansi Keuangan (SAP) mengatur mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, bagaimana cara menetapkan, mengukur dan melaporkannya. Laporan keuangan pokok yang wajib disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual yakni sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mewajibkan entitas pelaporan menyusun dan menyajikan tujuh laporan keuangan pokok yang terbagi ke dalam dua jenis pelaporan, yaitu pelaporan finansial berbasis akrual, pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis kas, dan CaLK. Pelaporan finansial terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. LRA Berbasis Kas
6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

2.2.1.4 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, maaf yang diperoleh yakni laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang terbuka, jujur dan menyeluruh terhadap stakeholder (Fahkhruzi, 2010). Dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, ekuitas dana pemerintah. Selain itu, manfaat standar akuntansi pemerintah yang lain adalah menyeimbangkan antar generasi yang dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran dan menentukan apakah generasi yang akan datang juga ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.2.1.5 Perbedaan SAP PP No. 24/2005 dengan PP No.71/2010

Tabel 2.2
Perbedaan SAP Lama dan SAP Baru

No	Keterangan	PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
1.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	Tidak ada laporan tersendiri.	Laporan LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya yakni : 1. Saldo anggaran lebih awal 2. Penggunaan saldo anggaran lebih 3. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan 4. Koreksi kesalahan pembukuan pada tahun sebelumnya 5. Lain-lain Saldo anggaran lebih akhir
2.	Neraca	Ekuitas dana terbagi atas : 1. Ekuitas dana lancar : merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, dan termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran atau saldo anggaran lebih 2. Ekuitas dana investasi : mencerminkan kekayaan pemerintahan yang terdapat dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang Ekuitas dana cadangan : mencerminkan kekayaan	Hanya ekuitas, yakni kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas dalam neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

Sumber : PP 71 Tahun 2010, Data diolah peneliti (2022)

Tabel 2.2
Perbedaan SAP Lama dan SAP Baru

No	Keterangan	PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
		pemerintahan yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
3.	Laporan Arus Kas	Laporan arus kas disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.	Laporan arus kas disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
4.	Penyusutan Aset	Tidak diuraikan dalam kerangka konseptual.	Aset yang digunakan pemerintah kecuali beberapa aset tertentu seperti tanah yang mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas.
5.	Entitas Akuntansi	Belum ada uraian mengenai entitas akuntansi.	Terdapat uraian mengenai entitas akuntansi.
6.	Peranan Laporan Keuangan	Pelaporan diperlukan untuk kepentingan : - Akuntabilitas - Manajemen - Transparansi, dan - Keseimbangan antar generasi (Par 22)	Pelaporan diperlukan untuk kepentingan : - Akuntabilitas - Manajemen - Transparansi, dan - Evaluasi Kinerja (Par 25)
7.	Basis Akuntansi	1. Basis Kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam LRA 2. Basis Akrua, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca (Par 39)	1. Basis Akrua, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (Par 42) 2. Basis Kas, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Sumber : PP 71 Tahun 2010, Data diolah peneliti (2022)

2.2.2 Organisasi Sektor Publik

2.2.2.1 Pengertian Organisasi Sektor Publik

(Nordiawan, 2009) organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian negara yang tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang termasuk dalam organisasi sektor publik yakni institusi pemerintah, partai politik, sekolah, dan rumah sakit.

2.2.2.2 Peranan Organisasi Sektor Publik

Peranan organisasi sektor publik yakni memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat dan efisien atas suatu operasi dan sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. (Jones, 1993) organisasi sektor publik memiliki beberapa peran utama yakni :

1. *Regulatory Role*, berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tanpa adanya aturan oleh organisasi di lingkungan sektor publik maka ketimpangan akan terjadi di masyarakat.
2. *Enabling Role*, memiliki peran yang cukup besar untuk memperlancar aktivitas masyarakat secara aman, tertib dan lancar.
3. *Direct Provision of Goods and Services*, berperan untuk mengatur berbagai kegiatan produksi dan penjualan barang dan jasa. Dalam hal ini organisasi sektor publik berperan untuk mengendalikan dan mengawasi sejumlah regulasi yang tidak merugikan publik.

2.2.3 Akuntansi Berbasis Akrua

2.2.3.1 Pengertian Akuntansi Berbasis Akrua

(KSAP, 2006:3) basis akuntansi akrual merupakan suatu basis akuntansi dimana transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam pelaporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. KSAP juga menyatakan bahwa dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga hal tersebut dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif mengenai seluruh arus sumber daya dicatat.

2.2.3.2 Makna dan Pentingnya Akuntansi Berbasis Akrua

Akuntansi berbasis akrual memiliki manfaat dalam hal meningkatkan jumlah informasi didalam laporan akuntansi. Sebelum menggunakan akrual, para akuntan pada umumnya hanya mencatat kegiatan transaksi tunai di dalam laporannya. Namun, transaksi tunai saja tidak mampu memberikan informasi yang gamblang terkait aktivitas bisnisnya. Sebagai contoh pendapatan berdasarkan kredit sampai kewajiban yang harus dilakukan dimasa depan. Dengan melakukan pencatatan akrual, maka pihak perusahaan dapat mengukur apa saja yang terhutang dalam jangka waktu pendek, begitu juga dengan pendapatan tunai.

2.2.3.3 Pencatatan Akuntansi Berbasis Akrua

Dalam akuntansi berbasis akrual, pencatatan dilakukan ketika investor memberikan atau menerima layanan atau produk, bahkan sebelum

transaksi tunai dilakukan. Perusahaan akan mencatat segera pendapatan setelah investor mengirim produk atau memberikan layanan.

2.2.4 Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

2.2.4.1 Pengertian Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang maupun badan hukum koperasi melandaskan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta asas kekeluargaan untuk meningkatkan gerakan ekonomi rakyat. Sedangkan menurut UU No. 17 Tahun 2012, koperasi yakni badan hukum yang didirikan oleh seorang perseorangan atau badan hukum koperasi untuk pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha dan kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip ekonomi.

2.2.4.2 Makna dan Peranan Koperasi

Setiap organisasi tentunya memiliki makna dan peranan tertentu, begitu juga dengan organisasi koperasi. Koperasi memiliki makna dan peranan sebagai berikut :

- a. Memperkuat dan memperkokoh perekonomian masyarakat
- b. Berperan aktif dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi dan masyarakat
- c. Mengembangkan dan membangun kemampuan dan potensi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.

2.2.4.3 Pengertian Usaha Mikro dan Perdagangan

Menurut UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro merupakan usaha yang mempunyai kekayaan bersih maksimal sebanyak 50 juta rupiah. Usaha mikro dapat dinilai dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, terutama untuk sumber daya manusia yang berada pada pelosok dan daerah terpencil, karena usaha mikro ini tidak hanya berada pada kota-kota saja, melainkan juga tumbuh pesat pada daerah pedesaan.

(Bambang Utoyo, 2009) perdagangan merupakan proses tukar menukar barang atau jasa dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. (Marwati, 2002), perdagangan merupakan kegiatan yang mengaitkan antara produsen dan konsumen. Perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar sebagai kegiatan distribusi. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian perdagangan belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi yang mencakup koperasi dan usaha mikro.

2.2.4.4 Makna dan Peranan Usaha Mikro dan Perdagangan

Makna dan peranan usaha mikro dalam perekonomian masyarakat yakni dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara tepat. Setiap usaha dapat memenuhi berbagai kebutuhan serta keinginan masyarakat,

bahan baku yang digunakan pelaku usaha umumnya juga berasal dari masyarakat sekitar. Peran selanjutnya yaitu menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sejahtera dan merata, hal ini dapat memutar ekonomi yang terus berkembang di sela sela masyarakat.

Menurut UU No. 7 Tahun 2014, makna dan peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Dalam perdagangan ada yang disebut produsen yakni pihak yang membuat atau menyediakan bahan untuk diperdagangkan, kemudian konsumen adalah pihak yang membeli barang atau jasa yang diperdagangkan produsen.

2.2.3 Peranan SAP Berbasis Akrua

(Widjajarro, 2008) menjelaskan bahwa alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
2. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
3. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memiliki peranan yakni menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai posisi sumber daya

ekonomi dan ekuitas pemerintah. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 32, SAP yang diperlukan untuk penyelenggaraan akuntansi pemerintah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi yang diberlakukan untuk pemerintah pusat dan daerah. Mahmudi (2016:29) Menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan tersebut seharusnya disajikan. Standar Akuntansi Pemerintah mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui/dicatat, kapan harus diakui dan bagaimana cara mengukur serta melaporkannya. Terkait dengan standar akuntansi ini, pemerintah pada bulan Juni 2005 mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2005 yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyajikan laporan keuangan.

2.3 Kajian Islam

Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual memiliki manfaat yang sesuai dengan dalil dalam Q.S Al Isra' ayat 35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”.

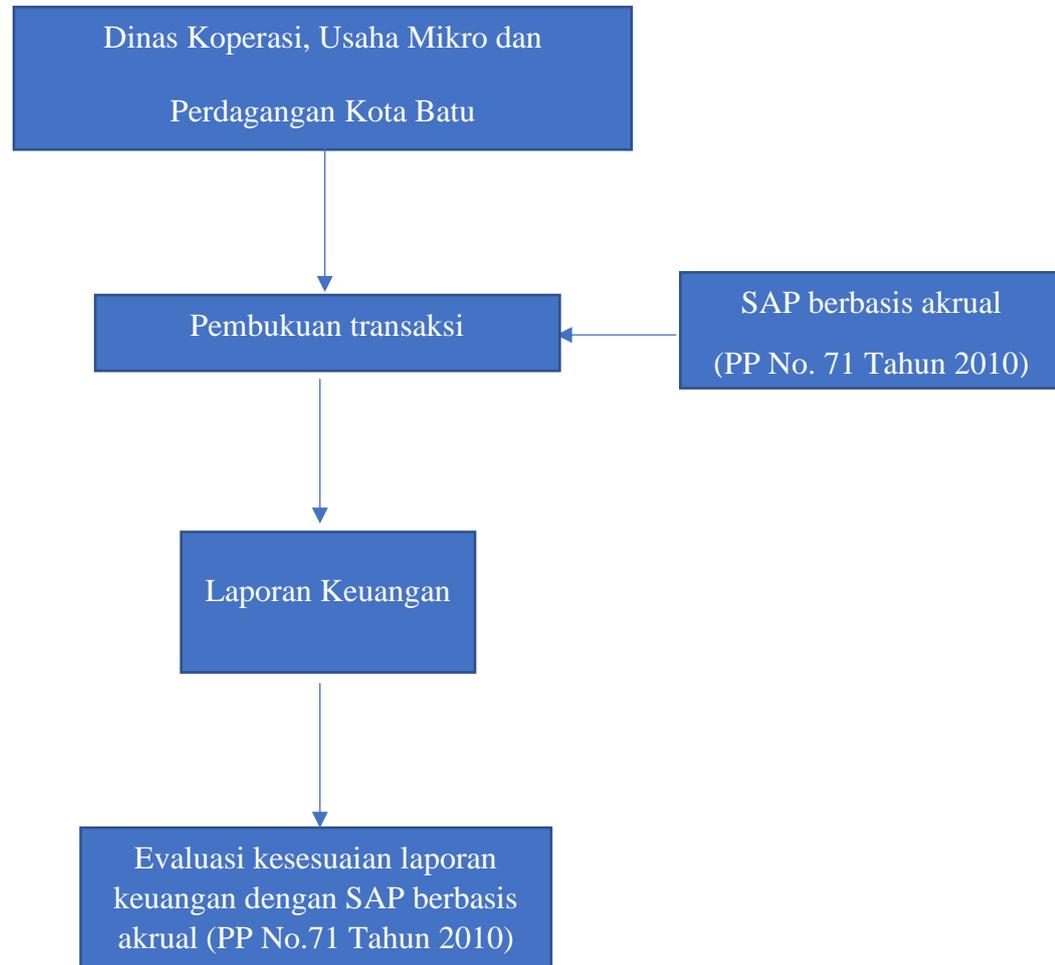
Kementrian agama Republik Indonesia memperikan tafsiran dari ayat diatas sebagai berikut.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, jangan mengurangi takaran untuk orang atau melebihkannya untuk dirimu, dan timbanglah dengan

timbangan yang benar sesuai dengan ukuran yang ditetapkan. Itulah yang lebih utama bagimu, karena dengan demikian orang akan percaya kepadamu dan tenteram dalam bermuamalah denganmu dan lebih baik akibatnya bagi kehidupan manusia pada umumnya di dunia dan bagi kehidupanmu di akhirat kelak.”

Mengacu pada ayat diatas, penggunaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual akan memberikan gambaran bagaimana kondisi keuangan yang sesungguhnya. Meskipun tidak memperhatikan bagaimana kas dibayarkan maupun diterima, namun diakui ketika hak dan kewajiban berpindah. Berdasarkan ayat tersebut maka pengakuan atas sebuah transaksi bisa dilakukan dengan benar dan sempurna.

2.4 Kerangka Berfikir



Keterangan :

Peneliti melihat pembukuan transaksi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu yang telah berpedoman pada SAP berbasis akrual, kemudian peneliti melihat laporan keuangan Dinas Koperasi dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan SAP berbasis akrual.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk memberikan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Ahmadi (2014: 15) metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam penggunaan SAP berbasis akrual guna melaporkan keuangannya.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa saja yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Menurut Patton dalam Ahmadi (2014:15), metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah dengan keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep tersebut lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yaitu data alamiah diperoleh dari hasil langsung yang berasal dari subjek peneliti. Dan data kualitatif merupakan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan beberapa pertanyaan oleh peneliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Batu Malang

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah informan yang bisa memberikan informasi terkait yang dibutuhkan selama proses penelitian. Subjek pada penelitian ini antara lain:

- a. Bapak Nasrul Hadi, S. Sos selaku Kepala Bagian Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu
- b. Bapak Dodi selaku Staff bagian Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.

3.4 Data dan Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari wawancara kepada subjek penelitian serta melakukan dokumentasi selama melakukan penelitian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari

dokumen atau data-data yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu seperti Laporan keuangan pemerintah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Alat yang paling banyak digunakan pada sebuah penelitian adalah melakukan wawancara sebagai pengumpulan data dari responden secara langsung (Sarosa, 2012:45). Adapun kategori wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara tak terstruktur, dan wawancara semi terstruktur.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Peneliti telah menyiapkan segala bentuk pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden nantinya saat wawancara (Sarosa, 2012:46). Namun tidak hanya berpacu pada pertanyaan yang telah di siapkan, peneliti juga perlu mencari topik lagi ketika responden telah memberikan jawaban, hal ini harus di ikuti dengan pertanyaan tambahan.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah menyusun beberapa pertanyaan yang akan di tanyakan kepada Kepala bidang Keuangan yaitu Bapak Nasrul Hadi S. Sos serta staff bidang keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu yaitu Ibu Kartika Febrianti S. Si.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi melihat dokumen serta arsip dalam bentuk tulisan maupun elektronik seperti buku,

majalah, artikel, foto, dan lainnya yang dapat memberikan informasi kepada peneliti terkait apa yang akan diteliti (Sarosa, 2012:61).

Pada penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dokumen yang dibutuhkan adalah bukti transaksi serta laporan keuangan seperti buku jurnal, laporan operasional, laporan realisasi anggaran (LRA) serta catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan CaLK.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan melihat serta menggunakan sumber dari literatur yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai referensi. Adapun literatur yang dimaksud seperti laporan penelitian, peraturan pemerintah, undang-undang yang berlaku, buku-buku ilmiah, serta sumber-sumber tertulis baik pada media cetak maupun media elektronik.

Pada penelitian ini studi kepustakaan yang digunakan dengan mengumpulkan data dari beberapa literatur yang berhubungan dengan sistem pencatatan berbasis akrual seperti Peraturan Pemerintah Nomer 71 tahun 2010 tentang penerapan SAP berbasis akrual, laporan penelitian yang berhubungan dengan basis akrual, serta artikel maupun ilmiah yang mendukung topik penelitian.

3.6 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian data kualitatif pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (Miles, 2012:129) dengan menggunakan tiga macam kegiatan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dilakukannya reduksi sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan penelusuran tema dan memo dengan maksud menyisihkan data dari informasi yang tidak relevan.

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara memilih data laporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang masuk dalam kategori PP Nomer 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, seperti neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas serta CALK yang mendukung topik penelitian.

2. Penyajian data

Bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara umum atau hanya bagian dari penelitian. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan dengan memilih data laporan keuangan yang diperoleh saat berlangsungnya observasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan rangkaian proses yang terkait dengan siklus akuntansi.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

Dalam penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus-menerus selama berlangsungnya penelitian. Mulai dari awal masuk ke lapangan serta selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis dan mencari makna dari data yang diperoleh.

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah peneliti melakukan analisis terhadap laporan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang terjadi pada periode akuntansi. Dokumen pendukung dan hasil analisis akan menjadi referensi untuk membuat kesimpulan agar hasil yang di dapatkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu berlokasi di Balai Kota Among Tani Jl. Panglima Sudirman No.507 Blok B3 Lantai 3 Kota Batu 65313 Telp/Fax 0341-592284, email: diskoperindag.kotabatu@gmail.com. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan di pimpin oleh kepala Dinas Bapak Drs. Eko Suhartono, MM.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu mempunyai peran membantu walikota dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan. Walikota Batu telah menetapkan Peraturan walikota Batu nomor 120 tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan Kota Batu.

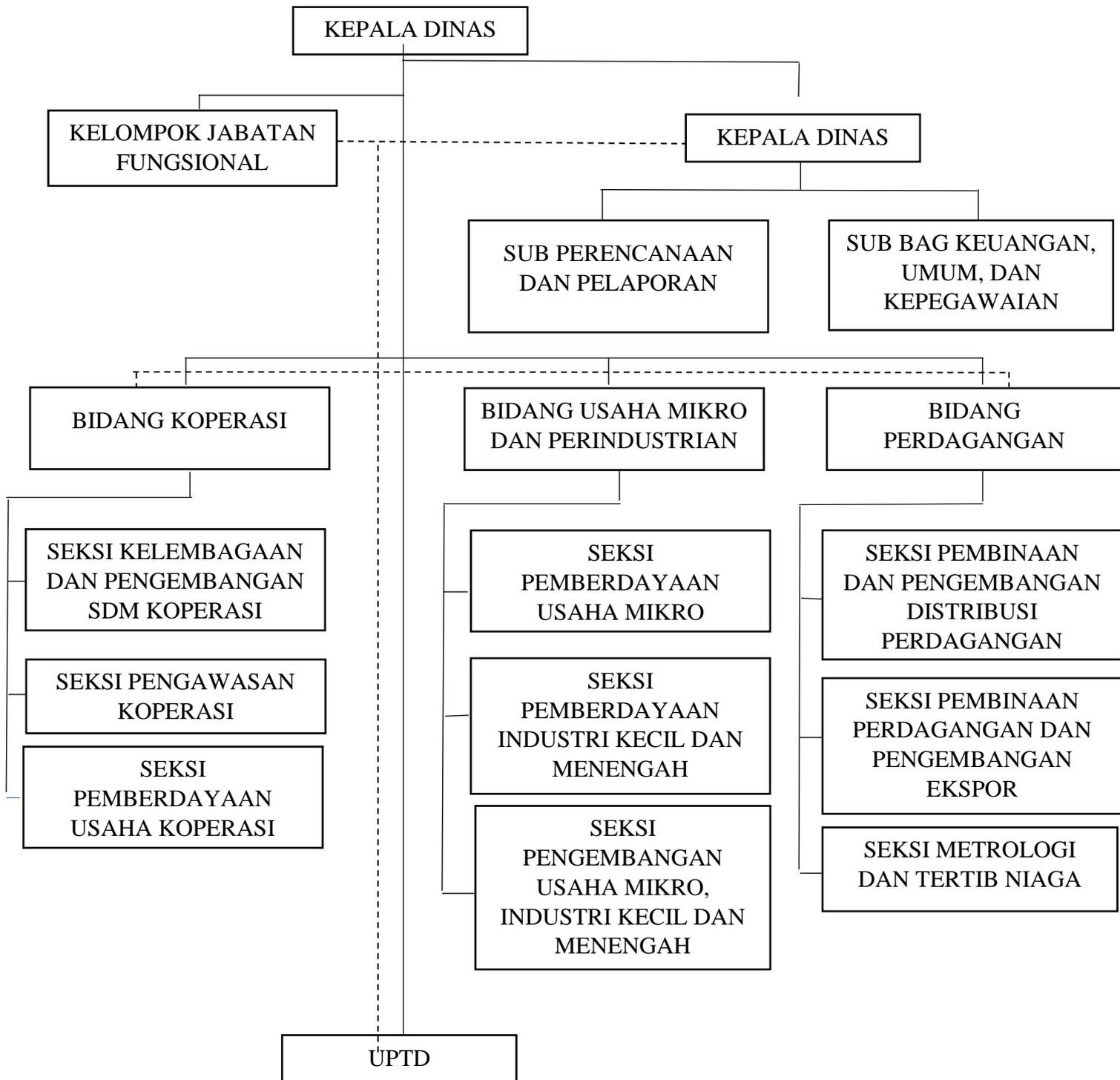
4.1.2 Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota batu terdiri atas :

1. Kepala dinas
2. Sekertariat yang membawahi Sub bagian perencanaan dan pelaporan serta Sub bagian keuangan, umum dan kepegawaian.

3. Bidang koperasi yang membawahi Seksi kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, seksi pengawasan koperasi, serta seksi pemberdayaan usaha koperasi.
4. Bidang usaha mikro yang membawahi seksi pemberdayaan usaha mikro serta seksi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
5. Bidang perdagangan yang membawahi seksi pembinaan dan pengembangan distribusi perdagangan, seksi pembinaan usaha perdagangan pengembangan ekspor serta seksi metrology dan tertib niaga.
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU



Sumber : data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

Tugas dan fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perdagangan Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat memiliki tugas yakni merencanakan, melaksanakan, koordisasi serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya ini, sekretariat mempunyai fungsi yaitu merumuskan kebijakan rencana program kegiatan dan anggaran dinas, mengelola dan melayani administrasi umum, koordinasi dan memfasilitasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi kapasitas kepegawaian, sebagai pengelola administrasi asset, pengelolaan urusan rumah tangga, pengelolaan pelayanan hubungan masyarakat dan publikasi, serta pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan.
2. Bidang koperasi memiliki tugas yakni merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan serta melaksanakan program dan mengendalikan kegiatan bidang kelembagaan serta pengembangan sumber daya manusia pada koperasi, mengawasi koperasi dan memberdayakan usaha koperasi. Dalam menjalankan tugasnya, bagian koperasi memiliki fungsi sebagai perencanaan segala program pada bidang koperasi, sebagai perumus dan Pembina kebijakan kelembagaan koperasi, penyusun standar operasional prosedur serta pengendali data informasi bidang kelembagaan dan

pengembangan sumber daya manusia, pengawasan koperasi dan pemberdayaan usaha koperasi.

3. Bagian usaha mikro memiliki tugas yakni merencanakan, merumuskan, mengkoordinasi, melaksanakan program serta mengendalikan kegiatan di bidang pemberdayaan usaha mikro dan menengah. Dalam menjalankan tugasnya, bagian usaha mikro memiliki fungsi sebagai perumus dan pengoordinasi kebijakan program bidang usaha mikro, sebagai Pembina bidang pemberdayaan usaha mikro, penyusun standar operasional dan pengendali data informasi bidang pemberdayaan usaha mikro, serta perumusan rekomendasi perizinan dan pengelolaan data izin usaha mikro dan kecil.
4. Bidang perdagangan memiliki tugas merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan program serta mengendalikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengembangan distribusi perdagangan, pembinaan usaha perdagangan dan pembangunan ekspor, metrology, dan tertib niaga. Dalam menjalankan tugasnya, bidang perdagangan memiliki fungsi sebagai perumus dan pengoordinasi kebijakan program bidang usaha perdagangan, serta perumusan rekomendasi perizinan kebijakan teknis perizinan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, penerbitan tanda daftar Gudang, penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba, penerbitan surat izin penjualan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual minum langsung di tempat, serta penerbitan surat izin perdagangan kayu antar pulau terdaftar.

4.1.4 Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

Tata kerja pada dinas koperasi, usaha mikro dan perdagangan Kota Batu adalah sebagai berikut :

1. Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi wajib diterapkan oleh kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi, dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya baik pada lingkungan sendiri maupun antar organisasi di lingkungan pemerintah daerah, instansi lain di luar pemerintah daerah.
2. Setiap pimpinan organisasi diberikan kewajiban dalam mengawasi bawahannya dalam melaksanakan tugas, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil Langkah yang diperlukan.
3. Setiap pimpinan organisasi diberikan kewajiban dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi tugas bawahannya.
4. Setiap pimpinan organisasi harus mematuhi petunjuk atasannya serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk pembuatan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
6. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang memiliki hubungan kerja.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pembahasan dari wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu sudah mulai menerapkan basis akrual dalam melaporkan keuangannya. Adapun laporan keuangan yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu yaitu ada 5 laporan keuangan, yaitu Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Hal ini telah ditegaskan oleh Kasubag Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu yaitu Bapak Nasrul Hadi, S. Sos bahwa penerapan basis akrual dalam Menyusun laporan keuangan harus dilakukan karena telah ada peraturan pemerintah yaitu PP No 71 Tahun 2010 tentang laporan keuangan berbasis akrual.

Memiliki komitmen dalam mewujudkan tujuan juga harus mendapatkan validasi dari tiap individu dalam sebuah organisasi dimana ketika individu dalam organisasi mau dan mampu melaksanakan komitmen bersama maka tercapailah suatu cita-cita organisasi. Hal ini juga di terapkan oleh para pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu khususnya di bagian keuangan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Bapak Nasrul Hadi berhasil menjadi Kasubbag yang mampu mengajak serta menuntun anggotanya untuk mau menerapkan SAP berbasis akrual meskipun beliau juga masih dalam tahap belajar dalam menggunakan basis akrual karena mengingat hal tersebut sudah ada pada peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 yang mana harus di terapkan oleh seluruh instansi pemerintah selambat-lambatnya pada tahun 2015. Para pegawai

khususnya pada bagian keuangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sudah memiliki kesiapan dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

4.2.1 Analisis Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

Sesuai dengan hakekatnya, laporan keuangan pemerintah adalah suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana public baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Penggunaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah digunakan untuk mengetahui nilai sumber ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual membawa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu untuk melaporkan keuangannya dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Berikut laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, antara lain adalah :

1. Laporan Operasional

Laporan operaisonal Dinas Koperasi, Usaha Mikr dan Perdagangan Kota Batu Tahun Anggaran 2021 untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Laporan Operasional

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN			
LAPORAN OPERASIONAL			
untuk Tahun yang Berakhir s.d 31 Desember 2021 dan 2020			
URAIAN	SALDO	SALDO	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	2021	2020	
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN- LO	Rp 1.698.769.800,00	Rp 1.274.751.050,00	Rp 424.018.750,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	Rp 1.698.769.800,00	Rp 1.274.751.050,00	Rp 424.018.750,00
Pajak Daerah - LO	Rp -	Rp -	Rp -
Retribusi Daerah - LO	Rp 1.694.131.000,00	Rp 1.249.278.050,00	Rp 444.852.950,00
Hasil Pengellaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Rp -	Rp -	Rp -
Lain-lain PAD yang Sah - LO	Rp 4.638.800,00	Rp 25.473.000,00	Rp (20.834.200,00)
PENDAPATAN TRANSFER - LO	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	Rp -	Rp -	Rp -
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp -	Rp -	Rp -
Pendapatan Hibah - LO	Rp -	Rp -	Rp -
Dana Darurat - LO	Rp -	Rp -	Rp -
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO	Rp -	Rp -	Rp -
BEBAN	Rp13.170.157.268,21	Rp 12.534.410.172,30	Rp 635.747.095,91
Beban Pegawai	Rp 7.622.087.838,00	Rp 8.055.778.065,00	Rp(433.690.227,00)
Beban Barang dan Jasa	Rp 3.559.183.183,00	Rp 3.469.395.035,29	Rp 89.788.147,71
Beban Bunga	Rp -	Rp -	Rp -
Beban Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -
Beban Hibah	Rp 49.400.000,00	Rp 84.269.900,00	Rp (34.869.900,00)
Beban Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	Rp -
Beban penyisihan Piutang	Rp 36.692.373,25	Rp 33.622.072,25	Rp 3.070.301,00
Beban lain-lain	Rp 10.561.483,00	Rp -	Rp 10.561.483,00
Beban penyusutan peralatan dan mesin	Rp 1.069.936.125,43	Rp 690.233.298,49	Rp 379.702.826,94
beban penyusutan gedung dan bangunan	Rp 681.060.782,78	Rp 174.261.176,27	Rp 506.799.606,51
Beban jalan, jaringan, dan irigasi	Rp 141.235.482,75	Rp 22.087.625,00	Rp 119.147.857,75
Beban penyusutan aset tetap lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Beban penyusutan aset lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
Beban amortisasi aset tak berwujud	Rp -	Rp 4.763.000,00	Rp (4.763.000,00)
Beban bagi hasil	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Beban bantuan keuangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI	(Rp11.471.387.469,21)	(Rp11.260.659.122,71)	(Rp210.728.346,50)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang - LO	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang - LO	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(Rp11.471.387.469,21)	(Rp11.260.659.122,71)	(Rp210.728.346,50)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			
	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
POS LUAR BIASA	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Beban tak terduga			
SURPLUS /DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(Rp11.471.387.469,21)	(Rp11.260.659.122,71)	(Rp210.728.346,50)

Sumber : Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, 2022

Analisis Laporan Operasional Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

1. Pendapatan LO per 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.698.769.800** naik 33,26% jika dibandingkan dengan pendapatan LO per 31 Desember 2021 per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 1.274.751.050,00**. Pendapatan - LO terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO dengan nilai **Rp1.698.769.800,00** yang mana PAD - LO dapat diuraikan sebagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO.

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

No	Uraian	Saldo
		31 Desember 2021
1	Retribusi Daerah - LO	
	a. Retribusi Jasa Usaha	
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	382.114.000,00
	b. Retribusi Jasa Umum - LO	
	- Retribusi Pelayanan Pasar - LO	1.285.961.800,00
	- Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	26.055.200,00
2	Lain – lain PAD yang Sah - LO	
	a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	4.638.800,00
	JUMLAH	1.698.769.800,00

2. Beban per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 13.170.157.269,21** atau naik (5,06 %) jika dibandingkan dengan Beban per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 12.535.410.172,71**.

3. Pada laporan operasional yang di buat oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu menunjukkan hasil Defisit sebesar **Rp 11.471.387.469,21**. Hal ini ditunjukkan bahwa pengeluaran atau beban yang di pakai yaitu sebesar **Rp. 12.535.410.172,71** sedangkan pendapatan sebesar **Rp1.698.769.800,00**.

4. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu Tahun Anggaran 2021 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2
Laporan Realisasi Anggaran

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH			
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021			
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
PENDAPATAN DAERAH	Rp 1.491.264.934	Rp 1.752.757.650	Rp261.492.716
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 1.491.264.934	Rp 1.752.757.650	Rp261.492.716
Retribusi Daerah	Rp 1.491.264.934	Rp 1.748.118.850	Rp256.853.916
Retribusi Jasa Umum	Rp 1.090.968.368	Rp 1.366.004.850	Rp275.036.482
Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 1.090.968.368	Rp 1.339.949.650	Rp248.981.282
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Rp -	Rp 26.055.200	Rp26.055.200
Retribusi Jasa Usaha	Rp 400.296.566	Rp 382.114.000	(Rp18.182.566)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp 400.296.566	Rp 382.114.000	(Rp18.182.566)
Lain-lain PAD yang Sah	Rp -	Rp 4.638.800	Rp4.638.800
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	Rp -	Rp 4.638.800	Rp4.638.800
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	Rp -	Rp 4.638.800	Rp4.638.800
BELANJA DAERAH	Rp 23.148.996.229	Rp 19.793.415.297	(Rp3.355.580.932)
BELANJA OPERASI	Rp 13.218.262.409	Rp 11.259.074.699	(Rp1.959.187.710)
Belanja Pegawai	Rp 7.912.429.431	Rp 7.622.087.838	(Rp290.341.593)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.466.638.903	Rp 4.301.055.642	(Rp165.583.261)
Belanja Gaji Pokok ASN	Rp 3.275.676.790	Rp 3.175.635.600	(Rp100.041.190)
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp 342.035.977	Rp 334.642.344	(Rp7.393.633)
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp 177.170.000	Rp 177.170.000	Rp0
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp 5.040.000	Rp 5.040.000	Rp0
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp 126.695.000	Rp 126.695.000	Rp0
Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp 214.080.726	Rp 209.438.640	(Rp4.642.086)
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp 4.311.462	Rp 4.222.478	(Rp88.984)
Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp 43.262	Rp 42.195	(Rp1.067)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp 257.937.518	Rp 242.099.655	(Rp15.837.863)
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp 6.662.001	Rp 6.517.409	(Rp144.592)
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp 19.986.968	Rp 19.552.303	(Rp434.665)
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	Rp 37.000.000	Rp -	(Rp37.000.000)

Sumber : Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, 2022

Gambar 4.2
Laporan Realisasi Anggaran (Lanjutan)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp3.050.122.928	Rp2.946.502.214	(Rp103.620.714)
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	Rp1.149.310.316	Rp1.105.697.398	(Rp43.612.918)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp135.295.468	Rp135.056.114	(Rp239.354)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	Rp0	Rp0	Rp0
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp1.765.517.144	Rp1.705.748.702	(Rp59.768.442)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp395.667.600	Rp374.530.000	(Rp21.137.600)
Belanja Honorarium	Rp395.667.600	Rp374.530.000	(Rp21.137.600)
Belanja Barang dan Jasa	Rp5.305.832.978	Rp3.587.586.861	(Rp1.718.246.117)
Belanja Barang	Rp1.214.095.518	Rp875.913.522	(Rp338.181.996)
Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.214.095.518	Rp875.913.522	(Rp338.181.996)
Belanja Barang Tak Habis Pakai	Rp0	Rp0	Rp0
Belanja Jasa	Rp3.547.065.469	Rp2.482.255.609	(Rp1.064.809.860)
Belanja Jasa Kantor	Rp2.981.557.200	Rp2.257.817.325	(Rp723.739.875)
Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	Rp91.729.560	Rp49.583.954	(Rp42.145.606)
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp77.178.700	Rp19.800.000	(Rp57.378.700)
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	Rp156.600.000	Rp155.054.330	(Rp1.545.670)
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	Rp200.000.000	Rp0	(Rp200.000.000)
Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp40.000.000	Rp0	(Rp40.000.000)
Belanja Pemeliharaan	Rp157.875.000	Rp38.821.000	(Rp119.054.000)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp110.835.000	Rp38.821.000	(Rp72.014.000)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp47.040.000	Rp0	(Rp47.040.000)
Belanja Perjalanan Dinas	Rp353.797.000	Rp161.346.730	(Rp192.450.270)
Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	Rp353.797.000	Rp161.346.730	(Rp192.450.270)
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp33.000.000	Rp29.250.000	(Rp3.750.000)
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp33.000.000	Rp29.250.000	(Rp3.750.000)
Belanja Hibah	Rp0	Rp49.400.000	Rp49.400.000
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia	Rp0	Rp49.400.000	Rp49.400.000
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp0	Rp0	Rp0
BELANJA MODAL	Rp9.930.733.820	Rp8.534.340.598	(Rp1.396.393.222)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp2.657.454.200	Rp2.163.701.556	(Rp493.752.644)
Belanja Modal Alat Besar	Rp263.384.000	Rp231.676.300	(Rp31.707.700)

Sumber : Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, 2022

Gambar 4.2
Laporan Realisasi Anggaran (Lanjutan)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
Belanja Modal Alat Besar Darat	Rp226.593.400	Rp195.075.000	(Rp31.518.400)
Belanja Modal Alat Bantu	Rp36.790.600	Rp36.601.300	(Rp189.300)
Belanja Modal Alat Angkutan	Rp159.000.000	Rp148.443.266	(Rp10.556.734)
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp159.000.000	Rp148.443.266	(Rp10.556.734)
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp194.645.999	Rp194.000.000	(Rp645.999)
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp0	Rp0	Rp0
Belanja Modal Alat Ukur	Rp194.645.999	Rp194.000.000	(Rp645.999)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp77.521.800	Rp75.020.000	(Rp2.501.800)
Belanja Modal Alat Kantor	Rp25.108.200	Rp24.815.000	(Rp293.200)
Belanja Modal Alat Kantor Rumah Tangga	Rp40.863.600	Rp40.230.000	(Rp633.600)
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp11.550.000	Rp9.975.000	(Rp1.575.000)
Belanja modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	Rp2.623.500	Rp2.535.000	(Rp88.500)
Belanja Modal Alat Studio	Rp2.623.500	Rp2.535.000	(Rp88.500)
Belanja Modal Alat Laboratorium	Rp223.208.900	Rp188.100.000	(Rp35.108.900)
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	Rp223.208.900	Rp188.100.000	(Rp35.108.900)
Belanja Modal Komputer	Rp1.734.271.000	Rp1.323.926.990	(Rp410.344.010)
Belanja Modal Komputer Unit	Rp219.083.800	Rp216.125.000	(Rp2.958.800)
Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp1.515.187.200	Rp1.107.801.990	(Rp407.385.210)
Belanja Modal Alat Pengeboran	Rp0	Rp0	Rp0
Belanja Modal Alat pengeboran Non Mesin	Rp0	Rp0	Rp0
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	Rp2.800.000	Rp0	(Rp2.800.000)
Belanja Modal Alat Pelindung	Rp2.800.000	Rp0	(Rp2.800.000)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp7.273.279.620	Rp6.370.638.042	(Rp902.641.578)
Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp7.273.279.620	Rp6.370.638.042	(Rp902.641.578)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp7.273.279.620	Rp6.370.638.042	(Rp902.641.578)
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp0	Rp0	Rp0
Belanja Modal Tugu/ Tanda Batas	Rp0	Rp0	Rp0
SURPLUS/ DEFISIT	(Rp21.657.731.295)	(Rp18.040.657.647)	Rp3.617.073.648
SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(Rp21.657.731.295)	(Rp18.040.657.647)	Rp3.617.073.648

Sumber : Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, 2022

Gambar 4.3
Laporan Realisasi Anggaran

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH			
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021			
URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	PERSENTASE
PENDAPATAN DAERAH	1.491.264.934,00	1.752.757.650,00	117,53
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.491.264.934,00	1.752.757.650,00	117,53
Retribusi Daerah	1.491.264.934,00	1.648.118.850,00	117,22
Lain-lain PAD yang Sah	-	4.538.800,00	-
BELANJA DAERAH	23.148.996.229,00	19.793.415.297,00	85,50
BELANJA OPERASI	13.218.262.409,00	11.259.074.699,00	85,18
Belanja Pegawai	7.912.429.431,00	7.622.087.838,00	96,33
Belanja Barang dan Jasa	5.305.832.978,00	3.587.586.861,00	67,52
Belanja Hibah	-	49.400.000,00	-
BELANJA MODAL	9.930.733.820,00	8.534.340.598,00	85,94
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.657.454.200,00	2.163.701.556,00	81,42
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.273.279.620,00	6.370.639.042,00	87,59
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
SURPLUS / (DEFISIT)	(21.657.731.295,00)	(18.040.657.647,00)	83,30
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(21.657.731.295,00)	(18.040.657.647,00)	83,30

Sumber : Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, 2022

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

1. Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu untuk tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.752.757.650,00 atau 117,53% dari anggaran sebesar Rp1.491.264.934,00. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan asli daerah berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Retribusi tempat khusus parkir dan pendapatan denda retribusi pelayanan pasar.
3. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 1.748.118.650,00** atau mengalami kenaikan sebesar **17,22 %** dari anggaran sebesar **Rp. 1.491.264.934,00**.

4. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp11.259.074.699,00** atau **85,18%** dari anggaran sebesar **Rp13.218.262.409,00**.
5. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp7.622.087.838,00** atau **96,33%** dari anggaran sebesar **Rp7.912.429.431,00**
6. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp2.897.150.701,00** atau **72,36%** dari anggaran sebesar **Rp. 4.003.846.471,41**.
7. Belanja hibah tahun anggaran 2021 sebesar Rp49.400.000 dikarenakan barang yang diserahkan ke masyarakat dikonversikan ke belanja hibah
8. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp8.534.340.598,00** atau **85,94%** dari anggaran sebesar **Rp9.930.733.820,00**.

4.2.2 Pemahaman Basis Akruwal pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

Penggunaan basis akruwal untuk Menyusun laporan keuangan sebuah instansi diperlukan pemahaman tentang basis akruwal oleh penyusun laporan keuangan. Oleh karena itu, pengetahuan yang dimiliki oleh individu penyusun laporan sangat berpengaruh untuk keberhasilan penerapan basis akruwal.

Pemahaman Bapak Nasrul Hadi S. Sos selaku kasubag keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu terhadap Basis akruwal pada Selasa, 19 Juli 2022 pukul 08.00 s/d 09.00 WIB sebagai berikut :

“Menurut saya basis akrual itu sendiri merupakan pencatatan yang dilakukan saat terjadinya transaksi tersebut. Misalnya ketika membeli barang untuk keperluan kantor maka langsung dicatat transaksinya oleh bendahara. Beberapa transaksi di dalamnya sudah berbasis online yang sebenarnya menggunakan prinsip akrual didalamnya. Sekarang yang paling mendesak adalah transaksi non tunai yang diterapkan dalam dinas ini, kenapa demikian? Karena transaksi secara tunai itu lebih berisiko dari segi penyelewengan dan penyalahgunaan, maka dari itu penggunaan transaksi non tunai diterapkan untuk meminimalisir risiko tersebut”.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Nasrul Hadi tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu sudah menjalankan sistem pelaporan keuangan dengan basis akrual. Dengan cara mencatat setiap transaksi pembelian barang pada saat itu juga tanpa memperhatikan itu dibayar tunai atau dibayar kredit. Untuk transaksi yang lebih di tonjolkan oleh Dinas ini yaitu menggunakan metode non tunai dengan tujuan menghindari kecurangan salah satu pihak. Namun tidak meninggalkan pula transaksi tunai jika transaksi tersebut tidak berjumlah besar.

Basis akrual digunakan untuk mengukur aset, utang, dan ekuitas. Basis akrual sendiri memiliki konsep yang mendasarkan pada 2 tonggak yaitu pendapatan dan beban. Pengakuan pendapatan menyebabkan perkiraan piutang tak tertagih dikarenakan suatu pendapatan akan tetap diakui meskipun kas belum diterima. Begitu pula dengan pengakuan beban, beban akan tetap dicatat meskipun belum dibayarkan. Hal ini memberikan dukungan bahwa pentingnya akuntansi akrual pada suatu organisasi untuk tetap mempertahankan pencatatan yang baik mengenai asset dan utang sehingga menghasilkan pengelolaan asset yang lebih baik.

Bapak Nasrul Hadi juga menambahkan :

“Saya selalu memantau bagaimana kegiatan bagian keuangan untuk melaporkan keuangan dinas harus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, meskipun saya sendiri juga sebenarnya masih tahap belajar tentang akuntansi berbasis akrual ini”.

Pernyataan tersebut juga menjelaskan bahwa sebenarnya Kasubag Keuangan masih dalam tahap belajar tentang akuntansi berbasis akrual, melihat Riwayat pendidikan beliau sendiri bukan dari lulusan akuntansi. Namun beliau tetap harus mematuhi peraturan yang ada.

Penggunaan basis akrual dalam pelaporan keuangan akan bermanfaat bagi pengguna untuk mengidentifikasi bagaimana keuangan pemerintah, serta bagaimana pemerintah membiayai setiap kegiatan sesuai dengan anggaran dana sehingga dapat mengukur kemampuan pemerintah yang sebenarnya, terutama pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.

4.2.3 Sosialisasi Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Akuntansi Berbasis Akrual

Sosialisasi merupakan kegiatan atau proses belajar yang dilakukan seseorang guna mendapatkan pengetahuan tentang nilai dan norma supaya dia ia bisa berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat (David Glasin). Melaksanakan sosialisasi ketika ada peraturan baru memang hal yang biasa dilakukan supaya setiap individu dapat belajar dan memahami peraturan baru, khususnya pada lingkup pemerintahan dilakukannya sebuah sosialisasi dengan tujuan memberikan pembelajaran serta pembekalan kepada pegawainya tentang apa yang akan disosialisasikan.

Penerapan basis akrual pada lingkup pemerintahan dilakukan guna mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual. Khususnya pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu para pegawai terutama pada bidang keuangan dituntut untuk belajar dan mampu memahami aturan tersebut sehingga dapat melaporkan keuangan instansi sesuai dengan peraturan yang ada.

Pernyataan Bapak Nasrul Hadi selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu mengenai sosialisasi peraturan ini pada 19 Juli 2022 pukul 08.00 s/d 09.00 berikut ini :

“Untuk sosialisasi peraturan itu (PP No 71 tahun 2010) sudah pernah dilakukan, terutama ditujukan pada bagian keuangan karena itu akan menjadi pedoman untuk penyusunan laporan keuangan dinas”.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa sosialisasi PP no 71 tahun 2010 sudah pernah dilakukan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Beliau berharap dengan adanya sosialisasi tersebut dapat membantu para pegawai untuk bisa memahami peraturan baru tentang basis akrual terutama para bagian keuangan di Dinas. Sosialisasi yang dilakukan secara rutin akan memberikan dampak yang baik pada pegawai yang dapat mempercepat penguasaan akuntansi berbasis akrual yang diterapkan termasuk juga pada pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Berikut adalah kegiatan mulai persiapan dari sosialisasi hingga penerapan akuntansi berbasis akrual pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Sosialisasi ini menurut Bapak Kasubag diadakan di awal pemberitahuan

PP No. 71 tahun 2010, yaitu dimulai dari tahun 2011 dan dilakukan pengawasan hingga tahun 2015. Kemudian implementasi dari tahun 2015 hingga sekarang.

Tabel 4.2
Kegiatan sosialisasi penerapan SAP berbasis akrual
Di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

Kegiatan	Telah terlaksana
Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual	√
Persiapan pelaksanaan SAP berbasis akrual	√
Pengembangan sistem akuntansi sebagai pendukung penerapan SAP berbasis akrual	√
Pengembangan SDM	√
Implementasi akuntansi berbasis akrual pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu	√

Sumber : data dari Dinas Koperasi, 2022

4.2.4 Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam Menerapkan SAP berbasis Akrual

Sumber daya manusia adalah tonggak utama sekaligus penggerak roda suatu organisasi guna mewujudkan setiap visi, misi dan tujuan dari sebuah organisasi. Sumber daya manusia menjadi kunci yang utama dalam melaksanakan sebuah kegiatan dan menentukan tercapainya suatu tujuan yang sudah direncanakan, pelaksanaan perubahan pada organisasi, serta sasaran suatu organisasi (Rahmayati: 2012).

Melihat sumber daya manusia adalah pemeran utama dalam penyusunan laporan keuangan yang berbasis akrual guna mencapai tujuan organisasi sehingga pemerintah harus dengan serius melakukan perencanaan sumber daya manusia pada

bidang akuntansi pemerintah. Sekaligus dengan memberikan sistem yang memadai supaya terhindar dari segala kecurangan yang mungkin bisa terjadi.

Menurut Bapak Nasrul Hadi mengenai Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan pada Selasa 19 Juli 2022, berikut ini:

“pegawai harus siap karena memang itu peraturan semua aturan tentang pengelolaan keuangan harus sesuai dengan peraturan baru, baik peraturan baru bahkan peraturan terbaru kita harus menyesuaikannya, dan harus siap semua tidak boleh ada yang belum siap terutama pada bidang keuangan itu sendiri, temen temen dan saya itu harus siap. Meskipun Sebagian dari kami bukan dari lingkungan akuntansi” .

Sebenarnya yang menjadi masalah adalah ketika pegawai bidang keuangan tidak semua yang berasal dari lingkup akuntansi, hal ini menjadi sebuah tugas bagi mereka untuk belajar lagi tentang akuntansi berbasis akrual. Namun hal ini akan tetap bisa dilakukan ketika pegawai mampu belajar dengan tekun serta mengikuti setiap sosialisasi tentang akuntansi berbasis akrual yang diadakan oleh dinas. Komitmen dari Kasubag dan staff keuangan menjadi pondasi untuk terus mempelajari serta menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan SAP yang berlaku yaitu SAP berbasis akrual.

Dilakukannya analisis pengetahuan, ketrampilan, kesiapan, dan manajemen sumber daya manusia dengan tujuan mengetahui seberapa kesiapan para pegawai dalam penerapan akuntansi basis akrual.

a. Analisis Pengetahuan

Memiliki pemahaman serta pengetahuan tentang akuntansi basis akrual adalah kunci bagi pegawai untuk melaporkan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual. Pemahaman para pegawai Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan

Perdagangan Kota Batu cukup baik dan mereka akan terus belajar mengenai ini.

b. Analisis Ketrampilan

Berbeda dengan pengetahuan, ketrampilan merupakan suatu Tindakan yang dilakukan para pegawai dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Keteguhan kasubag keuangan yang mengkomando timnya untuk selalu penaat peraturan yang ada baik itu yang baru maupun terbaru menjadikan pegawai terampil dalam dalam melakukan akuntansi berbasis akrual. Dinas ini juga melakukan pelatihanpelatihan khusus guna penerapan akuntansi berbasis akrual, sehingga para pegawai mampu mengikuti alur peraturan pemerintah terbaru tentang pelaporan keuangan suatu instansi.

c. Analisis Kesiapan

Adanya setiap sosialisasi tentang basis akrual yang mempunyai manfaat dan sebuah tantangan baru yang diikuti oleh para pegawai menunjukkan sikap pegawai yang mendukung akan hal tersebut. Sebagian besar para pegawai juga ingin bisa menerapkan basis akrual. Sehingga mereka terus belajar dan memahami basis akrual yang ada guna pelaporan keuangan dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.

Beberapa analisis diatas sudah menjelaskan bahwa pegawai pada dinas sudah siap dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual dan mereka juga mau untuk terus belajar supaya semakin mahir dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Tapi tidak hanya itu, pelatihan tentang akuntansi berbasis akrual harus rutin dilakukan agar pegawai semakin mahir dalam menggunakan akuntansi berbasis

akrual. Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan harus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada para pegawai nya dalam penggunaan basis akrual.

4.2.5 Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual

Berlakunya suatu peraturan baru memang membutuhkan adaptasi terlebih dahulu. Sama halnya dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Bebasis Akrual yang mengharuskan penyusun laporan keuangannya berubah Haluan dari yang sebelumnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Berbasis Kas.

Sumber daya manusia menjadi tokoh utama dalam menjalankan tujuan suatu pemerintahan. Begitu pula Sumber daya manusia yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, mereka akan menjadi tonggak keberhasilan suatu organisasi ketika sudah menjalankan tugasnya dengan benar.

Mengenai uraian diatas, tanggapan Bapak Nasrul Hadi selaku Kasubag Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan basis akrual, Selasa 19 Juli 2022 pukul 08.00 s/d 09.00 berikut ini :

“untuk saat ini kendala hanya ada pada SDM nya karena Sebagian besar dari kami bukan lulusan dari akuntansi, sehingga masih perlu banyak adaptasi dan pembelajaran terhadap SAP terbaru”.

Pernyataan dari Kasubag keuangan diatas menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu adalah dari Sumber Daya Manusianya, dimana mereka sebagian besar bukan berasal dari lingkungan akuntansi. Hal tersebut mengharuskan untuk Dinas ini agar sering

melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai SAP berbasis akrual untuk para pegawai, khususnya pegawai pada bagian keuangan.

4.2.6 Komitmen Organisasi Dalam Menerapkan SAP Berbasis Akrual

Kunci dari keberhasilan suatu perubahan ada pada pimpinan, dukungan yang kuat dari pimpinan menjadikan perubahan berjalan dengan baik. Salah satu penyebab lemahnya dalam Menyusun laporan keuangan pada beberpa lembaga yaitu lemahnya kinerja pimpinan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana dekonstruksi tugas pembantu (Bastia : 45).

Tanggapan Bapak Nasrul Hadi selaku Kasubag keuangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu mengenai komitmen organisasi pada Selasa 19 Juli 2022 08.00 s/d 09.00 adalah sebagai berikut :

“ya apabila peraturan sudah di sahkan maka kita harus melaksanakannya, seperti halnya di berlakukannya PP No 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Meskipun kami (saya dan tim keuangan) tidak semua berasal dari lingkungan akuntansi, kami akan terus belajar memahami standar akuntansi tersebut, karena ya memang sudah meraturan jadi harus di taati”.

Pernyataan dari kasubag keuangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu beliau berpendapat bahwa ketika sudah ada peraturan baru yang telah dibuat oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) maka Dinas harus melaksanakan peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen tinggi dari pemimpin untuk melaksanakan peraturan yang ada sudah diterapkan. Para pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu juga mendukung akan adanya peraturan pemerintah nomer 71 tahun 2010. Diharapkan penerapan basis akrual ini bisa dilaksanakan dengan baik sehingga tercipta laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pada Pernyataan tanggung jawab oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu juga menegaskan bahwa :

“laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu yang terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami”.

Adanya kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu tidak membuat para pegawai menjadi pesimis dalam menerapkan basis akrual nantinya. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu juga berlu konsentrasi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penerapan basis akrual. Mereka terus beroptimis dan semangat belajar tentang peraturan yang baru sehingga nantinya akan bisa lancar menerapkan SAP berbasis akrual yang sudah menggantikan SAP berbasis kas menuju akrual.

Komitmen Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu sangat mendukung adanya peraturan baru tentang SAP berbasis akrual untuk melaporkan keuangan dan berharap ini bisa terlaksana dengan baik melihat ada beberapa kendala yang harus dihadapi. Namun, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu berkomitmen ntuk terus belajar dalam menerapkan SAP berbasis akrual dalam pelaporan keuangan di dinas. Adapun bentuk perbaikan kendala atas SDM yang tidak berasal dari lingkungan akuntansi maka akan lebih baik jika sering di lakukannya pelatihan serta sosialisasi terhadap pegawai tentang akuntansi berbasiis akrual.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesiapan pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dalam mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual terlihat sudah siap dalam melaksanakannya sebagai bentuk kepatuhan kepada peraturan pemerintah yang berlaku. Adapun bentuk kesiapan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu adalah telah menerapkan SAP berbasis akrual pada laporan operasional dan laporan realisasi anggarannya. Meskipun para pegawai khususnya pegawai bagian keuangan selaku pembuat laporan keuangan tidak semua berasal dari lingkungan akuntansi, namun tidak menjadi pengahambat untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu juga telah melaksanakan sosialisasi mengenai Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu sudah menerapkan SAP berbasis akrual yang sudah ada pada PP No 71 Tahun 2010.
2. Hasil dari Laporan operasional periode 2021 yang dibuat oleh Dinas Koeprasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu menunjukkan hasil Defisit sebesar **Rp 11.471.387.469,21**. Hal ini ditunjukkan bahwa

pengeluaran atau beban yang di pakai yaitu sebesar **Rp. 12.535.410.172,71** sedangkan pendapatan sebesar **Rp1.698.769.800,00.**

3. Hasil dari laporan realisasi anggaran periode 2021 yang di buat oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu menunjukkan hasil **SILPA (Rp21.667.731.295,00)**
4. Komitmen organisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu mendukung adanya peraturan pemerintah yang baru dan akan menerapkannya karena mengingat ketika ada aturan maka harus ditaati.

5.2 Saran

Saran yang diberikan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan pelatihan tentang peraturan pemerintah mengenai standar akuntansi pemerintah yang baru maupun yang terbaru hendaknya rutin dilakukan supaya pegawai dapat membiasakan diri dengan peraturan yang ada.
2. Diperlukannya pengembangan tentang pemahaman standar akuntansi pemerintah oleh pegawai khususnya pegawai bagian keuangan.
3. Senantiasa mempertahankan komitmen organisasi untuk terus menaati peraturan pemerintah yang ada, khususnya pada dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rulam Ahmadi.
- Arifin, M. A. (2019). Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Government Governance. *Jurna Media Wahana Ekonomika*.
- Batu, P. K. (2020). Peraturan Walikota Batu No 120 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.
- Emzir. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Febransyah, & Astari, D. (2021). Analisis Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Pada Kantor Camat Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. *Jurna Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti)*, 28.
- Ikrima Chikita Sukadana, N. P. (n.d.). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Denpasar. E.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *WAHANA*.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *WAHANA*, 4.
- Khasanah, H. D., & Pramudyastuti, O. L. (2020). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua Di RSJ Prof Dr Soerojo Magelang. *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*.
- Lasabuda, A. A., Morasa, J., & Victorina, T. Z. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 173.
- Lestari, D., & Rahayu, S. (2020). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua Dalam Pengambilan Keputusan Internal Dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 77.
- Marlisa, & Mahdani, S. (2021). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan BPS

Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi*.

- Melina, S., Ahmad, I. H., & Yunus, R. (2020). Analisis Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Berbasis Akrua (Studi Kasus Pada BPKD Pemerintah Kabupaten Gowa). *Accounting journal STIE YPUP Makasar*, 83.
- Niu, F. A., Karamoy, H., & Tangkuman, S. (2014). Analisis Penerapan PP no 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kotamobagu. *Jurna EMBA*.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*.
- Pusat, P. (2005, juni 13). Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Standar Akuntansi Pemerintah No 24 tahun 2004.
- Pusat, P. (2010, oktober 22). Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Ranuba, E. D., Pangemanan, S., & Pinatik, S. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP no 71 Tahun 2010 pada DPKPA Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*.
- Rasyid, K. D., & Rahman, A. F. (2014). Analisis Perbedaan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Cash Towards Accrual (PP no 25/2005) Dengan SAP Berbasis Akrua (PP no 71/2010). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Safitri, A., Heriyanto, M., & Ibrahim, M. (2017). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. *Jurna Ilmu Administrasi Negara*, 227.
- Safitri, D. (2017). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*.
- Sako, U., & Lantowo, F. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*.
- Sarosa, S. (2017). *Penelitian Kuliitatif Dasar Dasar Edisi 2*. Jakarta.
- Sitorus, S., Kalangi, L., & Walandouw, K. (2015). Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP no 71

Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Jurnal EMBA.

Sri, H., Hendri, E., & Lilianti, E. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Media Akuntansi (Mediasi).

Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, 116.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@ui-malang.ac.id

Nomor : B-797/FEK.1/PP.00.9/04/2021 19 April 2022
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Pimpinan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu
Balai Kota Among Tani Gedung B Lantai 3
di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Vira Ayu Santi
NIM : 18520074
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Contact Person : 087784951402
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni,
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian

 **PEMERINTAH KOTA BATU**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Telepon/Fax: (0341) 511901
KOTA BATU

Batu, 21 Juni 2022
Kepada
Yth. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan
Perdagangan Kota Batu
Di -
Batu

Nomor : 0721/087/422.205/2022
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tanggal 07 Juni 2022 Nomor: B-876/FEK.1/PP.00 9/06/2021 Perihal Ijin Penelitian Dan Ijin Pertimbangan Dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu bahwa.

Nama/NIM/NIK : VIRA AYU SANTI (18520074)
Jurusan : Akuntansi
Fakultas/Universitas : Ekonomi / Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang

Bermaksud mengadakan Audiensi/Penelitian/PKN/PKL/Magang pada Intansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut:

Tema/Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
Data yang dicari : Laporan Keuangan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
Peserta : -
Lokasi : Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batu
Waktu : 13 Juni 2022 S/d 12 Agustus 2022

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi yang menjadi locus Audiensi/Penelitian/Magang/PKL.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATU
Sekretaris

FAUZI S.Sos, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19650417 198503 1 005

→ **Tembusan:**
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran



PEMERINTAH KOTA BATU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Pemerintahan	: 2-17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi	: 2-17.3-30.3-31.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi	: 2-17.3-30.3-31.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	1.491.264.934,00	1.752.757.650,00	117,53	1.476.293.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.491.264.934,00	1.752.757.650,00	117,53	1.476.293.500,00
4.1.2	Retribusi Daerah	1.491.264.934,00	1.748.118.850,00	117,22	1.450.820.500,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	4.638.800,00	0,00	25.473.000,00
5	BELANJA DAERAH	23.148.996.229,00	19.793.415.297,00	85,50	12.754.264.791,00
5.1	BELANJA OPERASI	13.218.262.409,00	11.259.074.699,00	85,18	11.524.248.666,00
5.1.1	Belanja Pegawai	7.912.429.431,00	7.622.087.838,00	96,33	8.056.778.065,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.305.832.978,00	3.587.586.861,00	67,62	3.383.200.701,00
5.1.5	Belanja Hibah	0,00	49.400.000,00	0,00	84.269.900,00
5.2	BELANJA MODAL	9.930.733.820,00	8.534.340.598,00	85,94	1.230.016.125,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.657.454.200,00	2.163.701.556,00	81,42	636.198.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.273.279.620,00	6.370.639.042,00	87,59	495.936.625,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	97.881.500,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.657.731.295,00)	(18.040.657.647,00)	83,30	(11.277.971.291,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(21.657.731.295,00)	(18.040.657.647,00)	83,30	(11.277.971.291,00)

Kota Batu, 31 Desember 2021 PENGUNA ANGGARAN _____ Drs. EKO SUHARTONO, MM NIP. 19680616 198809 1 001
--

Lampiran 4 Laporan Operasional



PEMERINTAH KOTA BATU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Pemerintahan : 2-17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi : 2-17.3-30.3-31.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2-17.3-30.3-31.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	1.698.769.800,00	1.274.751.050,00	424.018.750,00	33,26
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.698.769.800,00	1.274.751.050,00	424.018.750,00	33,26
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	1.694.131.000,00	1.249.278.050,00	444.852.950,00	35,61
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	4.638.800,00	25.473.000,00	(20.834.200,00)	(81,79)
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	13.170.157.269,21	12.535.410.172,71	634.747.096,50	5,06
8.1.1	Beban Pegawai	7.622.087.838,00	8.056.778.065,00	(434.690.227,00)	(5,40)
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	3.559.183.183,00	3.469.395.035,20	89.788.147,80	2,59
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	49.400.000,00	84.269.900,00	(34.869.900,00)	(41,38)
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	36.692.373,25	33.622.072,75	3.070.300,50	9,13
8.1.8	Beban Lain-lain	10.561.483,00	0,00	10.561.483,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.069.936.125,43	690.233.298,49	379.702.826,94	55,01
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	681.060.782,78	174.261.176,27	506.799.606,51	290,83
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	141.235.483,75	22.087.625,00	119.147.858,75	539,43
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	4.763.000,00	(4.763.000,00)	(100,00)

LAPORAN OPERASIONAL

Halaman 1 dari 2

Prinsipal (Ba) SIA/IG

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Pemerintahan : 2-17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi : 2-17.3-30.3-31.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2-17.3-30.3-31.01.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(11.471.387.469,21)	(11.260.659.122,71)	(210.728.346,50)	1,87
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(11.471.387.469,21)	(11.260.659.122,71)	(210.728.346,50)	1,87
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(11.471.387.469,21)	(11.260.659.122,71)	(210.728.346,50)	1,87

Kota Batu, 31 Desember 2021
PENGUNA ANGGARAN

Drs. EKO SUHARTONO, MM
 NIP. 19680616 198809 1 001

Lampiran 5 Dokumentasi saat wawancara dengan Pak Nasrul Hadi dan Pak Dodi

